

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Penuntut Umum dalam penyempurnaan berkas perkara serta proses dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang diawali dengan tindak pidana pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa peran Penuntut Umum dalam penyempurnaan berkas perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari tindak pidana pungutan liar didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Kejaksaan dalam menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan sebagai bagian dari proses penuntutan di dalam menentukan jenis pidana dan berat ringannya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang diawali dengan tindak pidana pungutan liar. Proses di dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang diawali dengan tindak pidana pungutan liar dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum melalui proses prapenuntutan dan penuntutan sampai dengan penjatuhan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tahap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang diawali dengan tindak pidana pungutan liar dilakukan oleh Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum pidana dan hukum acara pidana, undang-undang kejaksaan, dan undang-undang tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRAC

This study aims to identify and analyze the role of the Public Prosecutor in perfecting case files and the process of uncovering criminal acts of corruption that began with illegal levies. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study can show that the role of the Public Prosecutor in improving the case files of corruption cases originating from the crime of illegal payments is based on the provisions of Article 30 paragraph (1) b of the Prosecutor's Law in receiving and examining investigative case files as part of the prosecution process in determine the type of crime and the severity of criminal penalties for perpetrators of criminal acts of corruption beginning with the crime of illegal levies. The process of uncovering criminal acts of corruption that begins with illegal levies begins with an investigation by the Prosecutor's Office and the Police to be transferred to the Public Prosecutor through the pre-prosecution and prosecution process until the imposition of a criminal that has permanent legal force. At the stage of resolving cases of criminal acts of corruption that began with criminal acts of illegal levies carried out by the Prosecutor's Office in accordance with the provisions of criminal law and criminal procedural law, the prosecutor's law, and the corruption law.

Keywords: Corruption, Illegal Fees, Public Prosecutor.